

SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN BELANJA MODAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Isra' Chikah Arfah¹, Suhartina R², Nurul Rezki Fajrianti³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Lembaga Pendidikan Indonesia

isra@stie-lpi.ac.id¹, suhartina@stie-lpi.ac.id², nurulrezkifajrianti@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to analyze the system for recording and reporting capital expenditures at the Department of Culture and Tourism. The research used is a type of qualitative research. The data source used in this study is secondary data, in the form of financial reports and budget realization reports from the 2022 Department of Culture and Tourism. The analysis technique used in this study is a qualitative analysis of the Budget Realization Report of the Department of Culture and Tourism. Methods of data collection is done by way of interviews and observation.

The results of the study show that the Capital Expenditure Recording and Reporting System at the Culture and Tourism Office of South Sulawesi Province is considered to have followed Government Accounting Standards PP No. 71 of 2010 where the Budget Realization Report (LRA) still uses a cash basis. This capital expenditure recording and reporting system also uses special software to provide Budget Realization Reports (LRA), namely SIMBAKDA (Regional Goods and Wealth Management Information System) which can make it easier for employees to provide data and information.

Keywords: System for Recording, Reporting, Capital Expenditures

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisa terhadap sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keuangan dan laporan realisasi anggaran dari Tahun 2022 Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. Adapun teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif terhadap Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pencatatan dan Pelaporan Belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di nilai sudah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan PP No. 71 tahun 2010 yang di mana Laporan Realisasi Anggarannya (LRA) masih menggunakan kas basis. Sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal ini juga sudah menggunakan perangkat lunak khusus untuk menyediakan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Kekayaan Daerah) yang dapat mempermudah para pegawai dalam penyediaan data dan informasi.

Kata Kunci: Sistem Pencatatan, Pelaporan, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Laporan keuangan pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menerapkan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan harus digunakan sebagai acuan dalam membuat laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya dan dengan demikian dapat terwujud pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) memiliki kewenangan dalam menentukan belanja-belanja yang akan dilaksanakan dalam memenuhi kebutuhan, guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat. Belanja-belanja yang dilakukan SKPD adalah belanja langsung yang meliputi Belanja Modal, belanja barang dan jasa.

Menurut Lomboan, Tinangon (2022), Pencatatan dan pelaporan belanja modal merupakan kegiatan dari akuntansi yang berkaitan dengan belanja modal. Suatu pencatatan dan pelaporan belanja modal penting agar dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan dana dari pemerintah dan sebagai bentuk konkrit dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas setiap dana yang digunakan. Laporan pertanggung jawaban atas penggunaan dana ini dalam bentuk laporan keuangan pemerintah.

Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan memiliki peran penting dalam mengembangkan dan mempromosikan potensi kebudayaan dan pariwisata di wilayah tersebut. Diperlukan pengelolaan dana yang efektif dan transparan, terutama dalam hal belanja modal. Belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan infrastruktur, sarana, prasarana, dan fasilitas publik yang berhubungan dengan sektor kebudayaan dan pariwisata. Namun, dalam praktiknya, pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan masih menghadapi beberapa tantangan.

Kegiatan pada bidang kebudayaan dan kepariwisataan sering melibatkan berbagai proyek yang kompleks, seperti pembangunan museum, pemugaran situs bersejarah, pengembangan destinasi pariwisata, dan lain sebagainya. Pengelolaan belanja modal untuk proyek-proyek semacam ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang peraturan dan prosedur yang berlaku serta kemampuan untuk mengkoordinasikan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dan upaya yang lebih besar dalam meningkatkan pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

Sistem pencatatan yang kurang tepat pada SKPD Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaporan belanja modal akan membuat pegawai Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan akan kurang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, misalnya penerapan pencatatan dilakukan hanya sistem manual saja, maka hal ini akan membuat pekerjaan Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan akan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pelaporan keuangan khususnya belanja modal. Berdasarkan teknologi saat ini pencatatan dan pelaporan belanja modal dapat dilakukan dengan sistem entry data. sistem entry data adalah, proses memindahkan data dari fisik menjadi data digital yang dapat diolah oleh software. Sistem ini akan sangat membantu pekerjaan pegawai Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan dalam pelaporan data belanja modal secara cepat, tepat dan efektif.

Hasil penelitian terdahulu yakni tentang sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal. Peneliti Mamoto dkk. (2023), Prosedur pencatatan yang kurang tepat pada SKPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Manado dalam pelaporan belanja modal akan membuat pegawai Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Manado akan kurang efektif dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu.:

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah : "Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan

KAJIAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Menurut Ridho (2021), akuntansi adalah sekumpulan kegiatan yang melibatkan pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan berbagai transaksi dan kejadian keuangan suatu entitas selama periode waktu tertentu. Kegiatan ini bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang menyajikan informasi secara komprehensif mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas tersebut. Laporan keuangan yang dihasilkan dari proses akuntansi ini harus memenuhi standar dan prinsip akuntansi yang berlaku serta harus dapat dipertanggungjawabkan kepada berbagai pihak yang memiliki kepentingan terhadap entitas tersebut, seperti pemilik perusahaan, investor, kreditor, dan pihak pemerintah. Keakuratan dan keandalan laporan keuangan tersebut memegang peranan penting dalam membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan yang informasional dan strategis mengenai entitas tersebut.

Sedangkan menurut Karmila dkk (2021), menjelaskan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan yang memiliki tujuan utama untuk mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi penting mengenai keuangan suatu entitas kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Melalui akuntansi, data keuangan seperti pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban diorganisir dengan terstruktur dan dapat dipahami sehingga dapat memberikan pandangan yang jelas tentang kinerja keuangan dan kondisi keuangan entitas tersebut. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi ini berguna bagi manajemen perusahaan, investor, kreditor, dan pihak-pihak lainnya untuk pengambilan keputusan yang tepat serta untuk memantau kesehatan keuangan dan kelangsungan bisnis entitas tersebut.

Akuntansi Sektor Publik

Istilah sektor publik memiliki pengertian yang bervariasi, dalam hal ini dikarenakan luasnya lingkup publik jika dilihat dari segi politik, ekonomi, hukum dan sosial pasti memiliki *point of view* yang berbeda-beda. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik didefinisikan sebagai sebuah organisasi entitas ekonomi yang berhubungan dengan usaha dan keuangan yang digunakan dalam pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan melalui pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan atau meningkatkan kesejahteraannya.

Akuntansi Sektor Pemerintahan

Menurut Watulingas dkk (2019), mengatakan bahwa akuntansi pemerintahan mencakup aspek keuangan negara secara menyeluruh, dimulai dari proses perencanaan anggaran hingga pelaksanaan dan pelaporan, termasuk analisis mengenai dampak yang dihasilkan dari kebijakan keuangan tersebut. Dengan demikian, akuntansi pemerintahan berperan penting dalam mengelola sumber daya finansial pemerintah dengan transparansi dan akuntabilitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Tandayu (2019), Mencakup beberapa tahapan penting yaitu, mengidentifikasi, mencatat, mengukur, mengklasifikasikan, dan mengikhtisarkan transaksi dan masalah keuangan. Selain itu, melibatkan penyajian laporan dan menginterpretasikan hasil dari proses tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah. Proses ini menjadi landasan penting dalam mengelola keuangan negara dengan cermat serta memastikan akuntabilitas yang efektif untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkelanjutan perekonomian negara.

2.1.4 Sistem Pencatatan Akuntansi

Penerapan sistem pencatatan akuntansi membawa manfaat besar bagi pemerintah karena dapat membantu mengelola seluruh proses akuntansi, termasuk pencatatan data, perhitungan, dan pelaporan keuangan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan sistem ini, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mengelola data keuangan, mengurangi resiko kesalahan manusia, dan menyediakan informasi keuangan yang lebih akurat dan cepat. Hasilnya, pemerintah dapat membuat keputusan lebih tepat waktu dan

didasarkan pada data yang dapat di percaya, yang pada akhirnya memungkinkan pemerintah untuk tumbuh dan berkembang lebih baik dalam lingkungan yang kompetitif. Sistem pencatatan akuntansi merupakan pondasi yang kuat bagi kesuksesan pemerintahan dalam mencapai tujuan keuangan dan operasionalnya.

Sistem pencatatan akuntansi (*accounting record system*) adalah sebuah proses dimana data keuangan dan informasi lainnya secara sistematis dicatat dan disimpan. Sistem ini melayani berbagai kebutuhan keuangan, seperti membantu perusahaan untuk mengidentifikasi dan menilai aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Selain itu, sistem ini juga dapat digunakan untuk memantau histori finansial, mengidentifikasi kemungkinan masalah keuangan, dan memprediksi hasil finansial. Data yang tersedia melalui sistem pencatatan akuntansi digunakan untuk membuat laporan keuangan, seperti [laporan laba rugi](#), [neraca](#), dan [laporan arus kas](#). Dengan kata lain, sistem pencatatan akuntansi menyediakan basis data yang berguna untuk membantu perusahaan mengelola keuangan secara efektif.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.71 Tahun 2010, Standar Akuntansi yang telah diadopsi oleh pemerintah yang dikenal dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjadi landasan utama dalam mengelolah aspek keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) ini merupakan seperangkat prinsip-prinsip akuntansi yang telah dirancang secara khusus untuk dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini untuk memberikan suatu kerangka kerja yang jelas dan konsisten, sehingga memastikan bahwa laporan keuangan pemerintah dapat dipercaya, transparan, dan relevan bagi semua pihak yang memiliki kepentingan.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemantauan dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah secara keseluruhan. Dengan menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), proses pengelolaan dan publik dapat lebih terarah dan terkontrol dengan baik. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga berperan dalam mendorong tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Hal ini penting untuk menjamin penggunaan dana publik yang efisien, efektif, dan berintegritas.

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam pengelolaan keuangan pemerintah diharapkan dapat menciptakan efisiensi yang lebih baik dalam berbagai sektor pelayanan publik. Melalui transparansi dan kedisiplinan dalam mengikuti standar ini, diharapkan pelaksanaan program pembangunan nasional dapat tercapai dengan lebih baik, membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 PMK Nomor 238/PMK.05/2011, merupakan dasar utama yang terdiri dari serangkaian langkah-langkah terorganisir dengan baik, yang mencakup berbagai proses, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain yang memiliki peranan krusial dalam menjalankan fungsi akuntansi dalam suatu organisasi pemerintah. Dengan tujuan utama untuk mengelola dan merekam secara efisien seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam lingkup pemerintahan, sistem ini berperan sebagai pilar utama dalam mengatur dan mengawasi aliran keuangan negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) PP No.71 Tahun 2010

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintahan disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun

2010, maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyediakan berbagai informasi mengenai realisasi anggaran, pembiayaan, belanja dan lain sebagainya dan membandingkannya dengan jumlah anggaran di dalam suatu periode. Pada umumnya, laporan tersebut menyajikan berbagai macam hal yang berhubungan dengan anggaran keuangan. Adapun diantaranya berkaitan dengan alokasi, sumber serta penggunaan sumber daya keuangan yang biasanya dikelola pemerintah pusat maupun daerah.

Laporan Realisasi Anggaran sendiri mencakup beberapa unsur yakni Pendapatan LRA, Transfer, Belanja dan Pembiayaan.

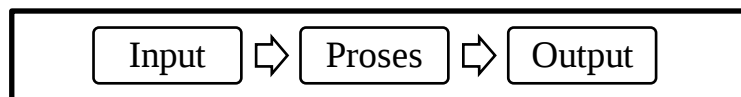
Sistem

Pengertian sistem

Romney (2006) berpendapat bahwa sistem adalah kumpulan dari dua atau lebih komponen yang saling bekerja dan berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Dia juga berpendapat bahwa perusahaan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa departemen yang bertindak sebagai subsistem yang membentuk sistem perusahaan tersebut. Sedangkan pendapat lain mengatakan sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu (Kamus Teknologi dan Informasi, 2009). Berdasarkan kedua pandangan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem dapat diartikan sebagai sekumpulan subsistem, komponen ataupun elemen yang saling bekerja sama dengan tujuan yang sama untuk menghasilkan output yang sudah di tentukan sebelumnya. (Mulyani, 2019).

Secara umum, sistem diartikan sebagai kumpulan komponen-komponen yang lebih kecil, bisa juga terdiri dari sistem-sistem yang lebih kecil yang disebut dengan subsistem, yang saling berkaitan satu dengan lainnya (*interrelated*) dan berinteraksi satu sama lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan yang sama. Di dalam setiap sistem/ subsistem itu sendiri ada suatu rentetan proses yang terdiri dari masukan/ input, proses itu sendiri, dan keluaran/ output. (Romney dan Stainbart, 2020)

Sistem

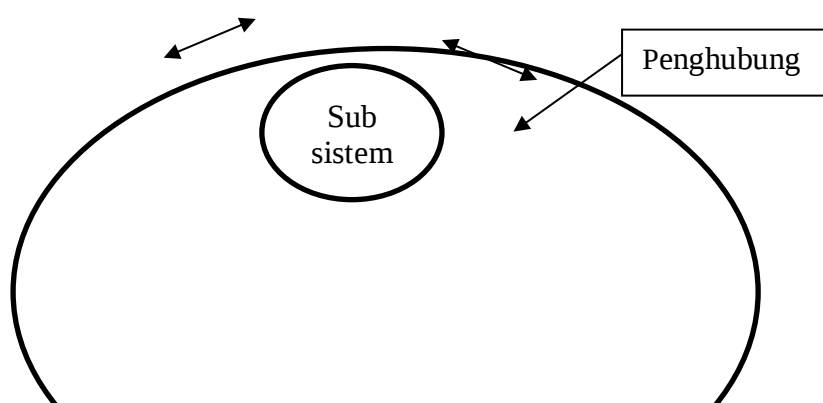


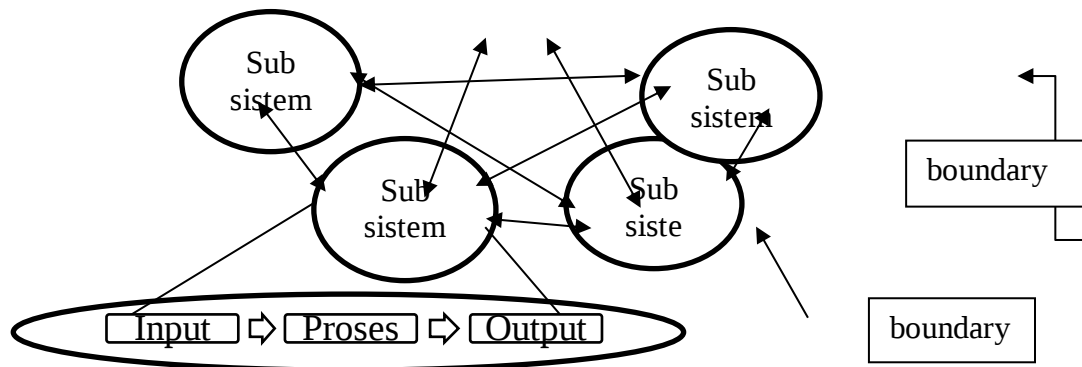
Gambar 2. 1 Rangkaian Unsur Suatu Sistem

Karakteristik sistem

Dalam sebuah sistem terdapat lebih dari 1 komponen di dalamnya. Komponen-komponen tersebut saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Komponen-komponen tersebut pun terdiri dari subsistem-subsistem yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Model suatu sistem secara sederhana adalah berupa 'input', 'proses', dan 'output'. Model kerja sebuah sistem dimulai dari aktivitas memasukkan data/ sumber daya yang ada (*input*) ke dalam sistem yang telah dirancang untuk kemudian diproses sesuai dengan rancangan sistem (*proses*), sehingga diperoleh hasil (*output*). (Sari, 2019).

Kerangka kerja suatu sistem secara lebih luas diwujudkan dalam gambar 2.2 berikut ini





Gambar Karakteristik Sebuah Sistem

Belanja Modal

Pentingnya Belanja Modal terletak pada kontribusinya dalam mendukung efisiensi dan efektivitas kegiatan pemerintahan. Investasi pada aset-aset tetap ini membantu menciptakan infrastruktur yang kokoh dan berkesinambungan, sehingga memfasilitasi penyediaan pelayanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Aset-aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal menjadi modal dasar bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Menurut SAP PP Nomor 71 Tahun 2010, belanja modal adalah kategori pengeluaran pemerintah yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan diarahkan untuk menambah kekayaan atau aset daerah. Belanja modal memiliki tujuan untuk memperoleh atau membangun aset tetap yang akan digunakan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan aset daerah. Salah satu efek dari belanja modal adalah meningkatnya belanja yang bersifat rutin, seperti biaya pemeliharaan, pada kelompok belanja administrasi umum. Setelah aset tetap dibangun atau diperoleh, perlu adanya biaya pemeliharaan dan operasional untuk menjaga dan memastikan aset tersebut dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan. Belanja modal menjadi strategis karena berperan dalam meningkatkan kualitas infrastruktur dan sarana pelayanan publik. Investasi pada aset tetap seperti pembangunan gedung, jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya berdampak positif pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam pengelolaan belanja modal, perencanaan yang matang dan efektif menjadi kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang dan memastikan penggunaan dana publik yang efisien dan akuntabel. Dengan demikian, belanja modal merupakan elemen penting dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan, sistem SAP yang diterapkan untuk belanja modal adalah SAP PP Nomor 71 Tahun 2010. Dalam SAP tersebut, Laporan Realisasi Anggaran menggunakan basis kas (*cash basic*). Basis kas merupakan metode pencatatan transaksi yang mengakui penerimaan atau pengeluaran kas secara efektif. Sesuai dengan SAP PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum negara/daerah. Artinya, pencatatan belanja modal dilakukan ketika uang kas benar-benar berpindah dan tercatat dalam rekening kas negara/daerah.

Pencatatan Belanja Modal

Menurut Wahyuni dan Hernusa (2021), menekankan bahwa pencatatan belanja modal merupakan suatu kegiatan atau proses penting dalam mendokumentasikan persediaan barang. Pencatatan ini juga mencakup perhitungan mengenai persediaan barang tersebut. Jika tidak ada pencatatan yang baik terkait belanja modal atau persediaan barang, maka informasi terkait pelaporan belanja modal juga akan menjadi tidak diketahui. Oleh karena itu, pencatatan belanja modal memiliki peran sentral dalam memastikan transparansi dan

akuntabilitas penggunaan dana untuk belanja modal serta memastikan bahwa informasi yang relevan tersedia untuk pengambilan keputusan yang tepat terkait pembangunan dan perbaikan aset dalam organisasi atau pemerintahan daerah.

Pelaporan Belanja Modal

Menurut Syafitri (2012), Pelaporan Belanja Modal berfungsi sebagai sarana untuk menyajikan informasi dan data mengenai keuangan suatu instansi, terutama yang berkaitan dengan aset, utang, dan biaya operasional. Pelaporan ini memberikan gambaran yang komprehensif tentang posisi keuangan instansi tersebut. Dengan adanya pelaporan keuangan yang disediakan oleh pihak instansi, para pemangku kepentingan dapat menggunakan informasi tersebut sebagai alat untuk memprediksi keadaan keuangan di masa depan. Melalui analisis data dan informasi dalam pelaporan, mereka dapat mengidentifikasi tren dan pola keuangan yang mungkin terjadi, sehingga memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan strategi yang lebih baik dalam mengelola sumber daya keuangan. Selain itu, pentingnya pelaporan belanja modal juga terletak pada peran meningkatkan transparansi dan akuntabilitas instansi. Dengan menyediakan informasi yang jelas dan terperinci tentang pengelolaan keuangan, instansi dapat memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, mengenai bagaimana mereka mengelola dana publik dengan baik dan bertanggung jawab.

METODE PENELITIAN

Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode analisis kualitatif deskriptif yaitu metode yang menggambarkan masalah-masalah aktual yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran cukup luas mengenai masalah yang dihadapi kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan. Dengan metode ini peneliti menganalisa dokumen yang terkait dalam sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal yang dilakukan di Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 Tahun 2010 dan proses pencatatannya di catat setelah di belanjakan atau di realisasikan dan telah menggunakan perangkat lunak khusus yaitu SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Kekayaan Daerah) yang dapat mempermudah para pegawai dalam penyediaan data dan informasi.

Aplikasi SIMBAKDA ini adalah sistem informasi penunjang kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam mengelola barang dan kekayaan daerah akan pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan Bulan Juni Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Pagu Anggaran	%
Belanja Daerah	42.919.477.117	8.727.313.127	34.192.163.990	20,33%
Belanja Operasi	41.265.425.117	8.727.313.127	32.538.111.990	21,15%
Belanja Modal	1.654.052.000	0,00	1.654.052.000	0,00%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.016.038.941	7.525.876.227	15.490.162.714	32,70%
Perencanaan,	192.197.300	99.076.200	93.121.100	51,55%

Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	149.264.500	97.502.500	51.762.000	65,32%
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	18.367.500	18.367.500	0,00	100,00 %
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan Cetak	3.340.000	3.340.000	0,00	100,00 %
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	850.000	850.000	0,00	100,00 %
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	63.750.000	63.495.000	255.000	99,60%

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan 2022

Dari tabel 4.1 dapat di lihat bahwa nilai dari angka anggaran yang direalisasikan untuk belanja modal tahun 2022 pada Laporan Realisasinya sebesar Rp. 0,00 dan juga nilai Anggarannya sebesar Rp. 1.654.052.000. maka dari tabel di atas tersebut dapat di simpulkan bahwa realisasinya Rp. 0,00 karena, proses pencatatan belanja modal yang di lakukan pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan di catat setelah dibelanjakan atau di realisasikan dan di realisasikannya itu pada saat Bulan Juli sampai Bulan September.

Susunan dari pelaporan realisasi yang telah dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai dengan SAP PP No.71 Tahun 2010 dan dari bagian Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan sudah sesuai karena pada format Laporan Realisasi Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah menampilkan rincian yang lengkap mengenai realisasi anggaran tersebut.

Tabel Perbandingan Sistem Belanja Modal

Kategori perbandingan	SAP PP No.71 Tahun 2010	Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan	Keterangan
Kriteria	Pengadaan aset tetap harus memenuhi kriteria: a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. b. Digunakan dalam kegiatan pemerintah, dan	Menurut dari hasil wawancara dari pak Musyawir, S.AP (pengurus barang), Kriteria Belanja Modal pada DISBUDPAR Provinsi Sulawesi Selatan: a. Masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan. b. Digunakan dalam	Sesuai

	c. Batas minimal kapitalisasi aset.	kegiatan operasional pemerintah. c. Berwujud. d. Biaya perolehan dapat di ukur. e. Kondisi siap pakai. f. Nilai di atas Rp. 1.000.000,00.	
Nilai Tukar	Belanja modal dicatat dengan menggunakan mata uang rupiah.	Menurut hasil wawancara dari Ibu Jenelien Lynthia Batilmurik, S.AP (Pengurus Barang) Belanja modal pada DISBUDPAR Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan mata uang rupiah sebagai alat tukar.	Sesuai
Pelaporan	Laporan yang dibuat dapat digunakan oleh berbagai pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan tujuan untuk mengambil suatu keputusan.	Menurut hasil wawancara dari Ibu Srijan S. Paranggai (Pengelolaan Pemasaran pada Barang Milik Daerah) Laporan yang dibuat oleh DISBUDPAR Provinsi Sulawesi Selatan dapat digunakan oleh beberapa pihak yang memiliki kepentingan dengan laporan tersebut dengan mempunyai tujuan untuk pengambilan suatu keputusan.	Sesuai
Sistem	Pencatatan dan pelaporan belanja modal dalam LRA menggunakan sistem Kas Basis (<i>Cash Basis</i>).	Menurut hasil wawancara dari Bapak Laode Muh. Ridwansyah, S.E LRA pada DISBUDPAR menggunakan sistem kas basis (<i>Cash Basis</i>) yang mana belanja modal di catat setelah dibelanjakan.	Sesuai

Sumber: Data olahan 2023

KESIMPULAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal pada Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan telah mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) No. 71 tahun 2010 yang mana proses pencatatan dan pelaporannya menggunakan sistem kas basis.
2. Sistem pencatatan dan pelaporan belanja modal ini juga sudah menggunakan perangkat lunak khusus yaitu SIMBAKDA (Sistem Informasi Manajemen Barang Dan

Kekayaan Daerah) yang dapat mempermudah para pegawai dalam penyediaan data dan informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- Astuty, S. 2022. "Belanja Pegawai Dan Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Modal." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* (November): 475–87.
- Eksandy, Arry, Mohamad Zulman Hakim, and Ekawati. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Pada Pemerintah Provinsi Banten Periode 2011-2015)." *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 2(2): 85.
- Indriakati, Andi Jenni, Fahni Ananda, and Jusmiati. 2020. "Sistem Akuntansi Belanja Modal Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Soppeng." *Jurnal Ilmiah METANSI (Manajemen dan Akuntansi)* 3(1): 22–27.
- Karmila, Dina, Jantje J. Tinangon, and Hendrik Gamaliel. 2021. "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara." 9(1): 668–78.
- Kartika, Erawati. 2019. "Analisis Perilaku Biaya Dalam Membuat Keputusan Menerima Atau Menolak Pesanan Khusus Pada PT. Putra Sejati." *Maksimum* 9(2): 64.
- Lazuardi, Alvin Herlandy, and Wahidahwati. 2022. "Paradigma New Public Management (NPM) Sebagai Kerangka Reformasi Birokrasi Menuju Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Indonesia." *Borneo Administrator* 2(3): 4–21.
- M.Ridho. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Pada Usaha Ayam Potong Di Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru." 28284(113): 28284.
- Mamoto, Putri Angelika et al. 2023. "Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kota Manado Recording and Reporting of Capital Expenditures at the Manado City Tourism and Culture Office." 6(2): 1505–12.
- Manossoh, Judhistira Hiskia, Jenny Morasa, and Lidia M. Mawikere. 2022. "Evaluasi Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal LPPM Bidang ...* 5(2): 511–20.
- Maria Helly Lomboan, Jantje Tinangon, Sherly Pinatik. 2022. "Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Sulawesi Utara Analysis Of Capital Expenditure Recording And Reporting Based On Of North Sulawesi Province." 6(1): 587–96.
- Nadiya, Eva Susanti, and Dedi Juanda. 2018. "Analisis Pencatatan Dan Pelaporan Belanja Modal Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pengembangan Mutu Guru." *Kolegial* 6(1): 45–56.
- Nevi Costari, and Putri Ariella Belinda. 2021. "Pentingnya Implementasi Akuntansi Sektor Publik Dalam Suatu Instansi Pemerintahan." *Jamanta : Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unita* 1(1): 58–77.
- Putri, Hani Hatimatunnisani & Alen Dereas. 2020. "Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis." *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* 20(1): 100–105.
- Rahayu, Dhea Putri. 2020. "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrua, Dan Sistem Pengendalian Intren Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Kasus Dinas Perikanan Kab.Subang)." *Prisma (Platform Riset Mahasiswa)* 01(05): 87–96.
- Rizal, Yani, and Erpita. 2019. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal Di Kota Langsa." *Jurnal Samudra Ekonomika* 3(1): 74–83.
- Romney dan Stainbart. (2020). Sistem Informasi Akuntansi, 3.
- Simanjuntak, Arthur, and Christina Ginting. 2019. "Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah." *Jurnal Manajemen* 5(2): 183–94.
- Syafitri, Lili. 2012. "Analisis Implementasi Akuntansi Belanja Modal Pada Pemerintah Kota

- Palembang." 2(22): 52–58.
- Utary, Vinny Siti. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Sukabumi." *JAMMI –Jurnal Akuntansi UMMI* 11(1): 80–96.
- Vini Oksilia Tandayu, Meily Kalola. 2019. "Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow." *Jurnal EMBA* 7(5): 3169–78.
- Wahyuni, Sekarsari, and Hardini Lestiani Hernusa. 2021. "Tinjauan Proses Penyusunan Anggaran Belanja Pada Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan." *Jurnal Aplikasi Bisnis Kesatuan* 1(2): 219–30.
- Watulingas, Patricia, Lintje Kalangi, and I Gede Suwetja. 2019. "Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus Di Desa Kapataran Kecamatan Lembean Timur Kabupaten Minahasa)." *Indonesia Accounting Journal* 1(2): 105.
- Zuliyana, Siti, Arifah Mawaddah, and Rini Hartati. 2023. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Pada Laporan Keuangan Dinas Pertanian Kabupaten Bengkalis Siti Zuliyana."

Buku:

- Samryn L.M. 2015. Pengantar Akuntansi Buku 2. Rajawali Pers, Jakarta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Link Website:

- <https://kledo.com/blog/sistem-pencatatan-akuntansi/>
- <https://peraturan.bpk.go.id>
- <https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=pengertian+SAP+PP+No.71+Tahun+2010+>
- <https://www.jurnal.id/id/blog/laporan-realisisi-anggaran/>
- <https://komputerisasi-akuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Akuntansi-Sektor-Publik-Pengertian-Menurut-Ahli-Tujuan-Jenis/95027ddda9394d8e849f37c0d0fa1bc83b639a08>